



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN  
PERPUSTAKAAN)**

=====

Tahun Sidang	:	2010 - 2011
Masa Persidangan	:	IV (Keempat)
Rapat Ke	:	26 (Duapuluh enam)
Sifat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Hari/Tanggal	:	Rabu, 13 Juli 2011
Pukul	:	14.30 – 16.30 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H. Mahyuddin NS, Sp.Og.(K)/Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	:	1. Pembahasan Laporan Keuangan Negara 2010 2. Lain-lain
Hadir	:	45 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Pemerintah	:	Menteri Kebudayaan dan Pariwisata beserta jajarannya.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

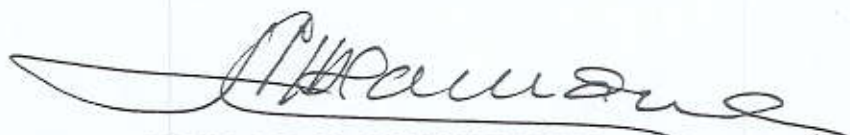
- I. Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pukul 14.30 WIB oleh Ketua Komisi X DPR RI, Prof. Dr. H. Mahyuddin NS, Sp.Og., dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- II. Rapat diawali dengan penjelasan Ketua Rapat mengenai agenda rapat kerja ini yang kemudian mempersilahkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si., untuk memimpin jalannya Rapat Kerja ini, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta tanggapan, saran, dan masukan dari anggota Komisi X DPR RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan/keputusan sebagai berikut :
  1. Komisi X DPR RI memberi apresiasi realisasi belanja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI sejumlah Rp1,589 Triliun atau 94,51% dari pagu definitif APBN TA 2010 sejumlah Rp1,682 Triliun di atas rata-rata nasional yaitu 93,58%, namun Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI untuk lebih meningkatkan kinerjanya dengan tetap memperhatikan efisiensi, tepat sasaran, dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah.

*Uleq*

2. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI atas hasil pemeriksaan BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2010 dengan opini "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)" yang berarti bahwa Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI dapat mempertahankan opini yang diperoleh terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2009.
3. Komisi X DPR RI mendesak Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata agar temuan-temuan atas pemeriksaan BPK RI menjadi perhatian yang serius dan perlu segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan opini pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2011 menjadi "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".

III. Rapat diakhiri pada pukul 16.30 WIB

Jakarta, 13 Juli 2011  
PIMPINAN KOMISI X DPR RI  
K E T U A,



PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, Sp.Og. (K)